

ABSTRAK

Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) merupakan salah satu kasus korupsi transnasional terbesar yang menimbulkan kerugian signifikan bagi Malaysia, baik secara ekonomi maupun politik. Penelitian ini menganalisis skandal 1MDB melalui kerangka Good Governance dengan tujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan oleh aktor-aktor terkait, serta bagaimana kegagalan penerapan prinsip tersebut berkontribusi pada terjadinya skandal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa laporan investigasi, literatur akademik, dan berita kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang paling lemah dalam pengelolaan 1MDB, sedangkan partisipasi publik melalui gerakan sipil seperti Bersih 4.0 berperan penting dalam mendorong akuntabilitas politik. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa lemahnya supremasi hukum serta adanya intervensi politik memperburuk penegakan hukum terhadap aktor yang terlibat. Kesimpulannya, skandal 1MDB memperlihatkan kegagalan tata kelola yang baik di Malaysia dan memberikan pelajaran penting mengenai urgensi penerapan prinsip Good Governance untuk mencegah korupsi sistemik di masa depan.

Kata Kunci: 1Malaysia Development Berhad, Good Governance, Malaysia, Korupsi

ABSTRACT

The 1Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal represents one of the largest transnational corruption cases, causing severe political, economic, and social repercussions for Malaysia. This research analyzes the scandal through the framework of Good Governance to assess the extent to which its principles were applied by relevant actors and how governance failures contributed to the crisis. The study employs a qualitative descriptive method, utilizing secondary data from investigation reports, academic literature, and credible news sources. The findings reveal that transparency and accountability were the most poorly implemented principles in the management of 1MDB, while public participation—particularly through civil movements such as Bersih 4.0—played a significant role in pushing for political accountability. Moreover, weak rule of law and political interference further undermined legal enforcement against those involved. In conclusion, the 1MDB scandal highlights the failure of good governance practices in Malaysia and underscores the urgency of implementing Good Governance principles to prevent systemic corruption in the future.

Keywords: *1Malaysia Development Berhad, Good Governance, Malaysia, Corruption*